



Analisis Peran Modal Sosial dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Inklusif Berkelanjutan

Analysis of the Role of Social Capital in Encouraging Community Empowerment for Sustainable Inclusive Development

**Yunita¹, Nurmalasyari², Almas Ressel Ulia³, Mukhammad Fajar Ardiansyah⁴,
Aisyah Ummu Inayah⁵, Ghina Via Salsabila⁶**

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: yunitayunita2@gmail.com¹, nurmalasyari035@mail.com², almasressul45@gmail.com³,
mukhammadfajar342@gmail.com⁴, nayainayah127@gmail.com⁵, viasalsabila723@gmail.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 15-06-2025

Revised : 16-06-2025

Accepted : 18-06-2025

Published : 20-06-2025

Abstract

Inclusive and sustainable development is one of the main goals in creating equitable social welfare. In this context, social capital plays an important role as a factor that drives community empowerment. Social capital includes social networks, norms, and trust that enable individuals and groups to work together effectively to achieve common goals. This research aims to analyze the role of social capital in enhancing community empowerment, particularly in supporting inclusive and sustainable development. This research uses a qualitative approach with a literature study method as the basis for analysis. The research results show that trust, social participation, and solidarity within the community significantly contribute to the success of empowerment programs. Strong social networks enable communities to access resources, enhance individual capacities, and strengthen their bargaining power in economic and social development. Moreover, the presence of high social capital can help create community independence, reduce inequality, and accelerate the achievement of sustainable development goals. However, despite having many benefits, this research also found that social capital can face various obstacles, such as lack of active participation, weak coordination among stakeholders, and excessive dependence on external parties. Therefore, appropriate strategies are needed to strengthen social capital, such as through community education, inclusive policies, strengthening local institutional capacity, and the formation and strengthening of community networks. Thus, social capital can become a key catalyst in creating more inclusive, sustainable, and equitable development for all layers of society.

Keywords: *Social Capital, Community Empowerment, Sustainable Inclusive Development*

Abstrak

Pembangunan inklusif dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang merata. Dalam konteks ini, modal sosial memainkan peran penting sebagai faktor yang mendorong pemberdayaan masyarakat. Modal sosial mencakup jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan individu dan kelompok bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan, partisipasi sosial, serta solidaritas dalam masyarakat berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan program pemberdayaan. Jaringan sosial yang kuat memungkinkan masyarakat untuk mengakses sumber daya, meningkatkan kapasitas individu, serta memperkuat daya tawar



mereka dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, keberadaan modal sosial yang tinggi dapat membantu menciptakan kemandirian masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, meskipun memiliki banyak manfaat, penelitian ini juga menemukan bahwa modal sosial dapat menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya partisipasi aktif, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memperkuat modal sosial, seperti melalui pendidikan masyarakat, kebijakan yang inklusif, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, serta pembentukan dan penguatan jejaring komunitas. Dengan demikian, modal sosial dapat menjadi katalisator utama dalam menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Modal Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Inklusif Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pembangunan inklusif berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam upaya mencapai tujuan ini, modal sosial menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat. Modal sosial merujuk pada jaringan, norma, dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat yang memungkinkan koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, modal sosial berperan dalam membangun solidaritas, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Kepercayaan dan hubungan sosial yang kuat dapat membantu kelompok masyarakat, terutama yang rentan dan terpinggirkan, untuk mengembangkan potensi mereka dan mencapai kemandirian. Dengan adanya jaringan sosial yang baik, masyarakat dapat berbagi informasi, meningkatkan kapasitas mereka, serta bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, modal sosial juga memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan. Ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi pemerintah dan organisasi sosial, mereka lebih cenderung berpartisipasi dalam program-program pembangunan. Sebaliknya, kurangnya modal sosial dapat menghambat implementasi kebijakan dan menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan. Namun, akses terhadap modal sosial sering kali tidak merata, sehingga menimbulkan tantangan dalam mewujudkan pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Faktor-faktor seperti ketimpangan gender, urbanisasi, dan perubahan sosial-ekonomi dapat mempengaruhi bagaimana modal sosial didistribusikan dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memperkuat modal sosial agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan memahami peran modal sosial dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jaringan sosial, norma, dan kepercayaan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif serta berkelanjutan.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik modal sosial dan perannya dalam pembangunan inklusif berkelanjutan. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai penelitian terdahulu, kebijakan, serta teori yang telah dikembangkan oleh akademisi dan praktisi dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, Menurut Sugiyono (2018), studi pustaka merupakan suatu kajian teoritis yang mencakup referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam suatu situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, sumber pustaka yang digunakan berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah, yaitu: mengidentifikasi masalah atau topik penelitian, mencari informasi yang relevan, mengkaji teori yang sesuai, mencari landasan teori, memperdalam pemahaman serta wawasan penulis, dan akhirnya menyusun serta menyampaikan hasil kajian dalam bentuk tertulis (Rahman, 2022). Sedangkan menurut Rosyidhana (2014:3) studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan membaca berbagai sumber tertulis, seperti buku atau literatur yang membahas landasan teori.

Metode ini juga mencakup pengumpulan data dan informasi melalui eksplorasi pengetahuan dari berbagai sumber, seperti buku, karya ilmiah, serta sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian (Afifah Ansori, 2024). Untuk menunjang proses pencarian dan identifikasi literatur yang relevan, peneliti memanfaatkan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI), seperti Publish or Perish dan Connected Papers. *Publish or Perish* digunakan untuk menelusuri artikel ilmiah berdasarkan kata kunci tertentu dan mengidentifikasi karya-karya yang memiliki pengaruh besar di bidang studi terkait. Sementara itu, Connected Papers digunakan untuk memetakan hubungan antar karya ilmiah, sehingga membantu peneliti dalam memahami perkembangan topik serta menemukan literatur yang saling berhubungan secara konseptual.

Proses penelitian meliputi beberapa tahapan, yaitu: mengidentifikasi masalah, menentukan kata kunci penelitian, menelusuri dan mengumpulkan literatur menggunakan bantuan alat AI, mengkaji teori yang sesuai, serta menyusun sintesis dari berbagai sumber. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian dalam bentuk naratif atau visual (tabel, diagram), dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Peran Modal Sosial dalam Pembangunan Inklusif

Modal sosial merupakan kumpulan nilai atau norma informal yang dianut bersama oleh anggota suatu kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Konsep ini didasarkan pada unsur kepercayaan, norma, serta jaringan sosial yang mendukung interaksi dan kerja sama dalam komunitas. Sejalan dengan itu, Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial didefinisikan sebagai sumber daya yang bersifat aktual maupun potensial yang dimiliki seseorang melalui jaringan sosial yang terstruktur dan berkelanjutan. Jaringan ini terbentuk dalam hubungan timbal balik, di mana individu yang menjadi bagian dari suatu kelompok sosial mendapatkan berbagai bentuk dukungan kolektif. (Jamaluddin Ancok 2003) dalam (Owa & Leda, 2023)



Selain itu, Bourdieu menekankan bahwa modal sosial memiliki keterkaitan dengan aspek ekonomi, budaya, serta bentuk-bentuk institusi sosial yang ada, seperti komunitas lokal atau sumber daya alam yang dimiliki suatu kelompok. Pendekatan ini menunjukkan bahwa modal sosial memberikan keuntungan dan peluang bagi individu melalui keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu, seperti paguyuban, kelompok arisan, atau asosiasi lainnya, yang berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Perlu kita ketahui bahwa modal sosial memiliki peran-peran penting dalam sebuah pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembangunan Masyarakat

Dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya perhatian diberikan pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek sosial dan manusia. Modal sosial sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial dan partisipasi masyarakat selama proses pembangunan. Program Rumah Terasi yang diinisiasi oleh Cirebon Power di Desa Kanci Kulon, Kabupaten Cirebon. Program ini memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan usaha produksi terasi. Selain memberikan fasilitas produksi, program ini juga memberikan pelatihan dan pembinaan, sehingga meningkatkan keterampilan dan pendapatan masyarakat setempat. Ini adalah contoh bagaimana inisiatif dari pihak swasta dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam program publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan aspek penting dalam meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Keberfungsian sosial mencerminkan kapasitas individu maupun kelompok dalam menjalankan peran sosialnya secara optimal di lingkungan masyarakat. Berdasarkan berbagai penelitian, partisipasi masyarakat tidak hanya berperan sebagai alat untuk mencapai keberhasilan suatu program, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan terhadap pemerintah, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kualitas tata kelola program yang dijalankan. (Jatnika et al., 2024)

2. Pentingnya Hubungan Sosial yang Kuat

Modal sosial terdiri dari jaringan hubungan sosial, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hubungan sosial yang kuat memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan berbagi sumber daya, yang dapat memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan lingkungan yang baik untuk pembangunan. Sejalan dengan itu, Modal sosial dapat dipahami sebagai elemen fundamental dalam organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang berperan dalam mempermudah koordinasi serta kerja sama demi kepentingan bersama.

Contohnya, tradisi gotong royong dalam membangun rumah atau menggelar acara pernikahan di kampung-kampung di Cirebon. Masyarakat saling membantu tenaga dan materi tanpa mengharapkan imbalan langsung. Kekuatan hubungan kekerabatan dan tetangga yang erat memungkinkan pelaksanaan kegiatan besar menjadi lebih ringan dan mempererat tali persaudaraan.

Sementara itu, Dang Taung dan Robert (dalam Macbeth, dkk., 2004:505) menjelaskan bahwa modal sosial mencakup hubungan sosial yang dapat bertransformasi menjadi modal ekonomi dalam situasi tertentu dan bahkan dapat dilembagakan dalam bentuk status sosial,



seperti gelar kehormatan (Maulidah & Setiajid, 2021). Contohnya Seorang individu dari keluarga terpandang atau memiliki gelar kehormatan sering kali lebih mudah mendapatkan akses ke jaringan bisnis atau peluang kerja karena status sosial yang dimilikinya.

3. Meningkatkan Kepercayaan dan Kerjasama

Modal sosial juga berperan dalam membangun kepercayaan antar individu dan kelompok. Kepercayaan sangat penting untuk pembangunan masyarakat, karena sulit untuk bekerja sama dan kolaborasi tanpa kepercayaan, karena dengan peningkatan kepercayaan masyarakat, kerjasama yang lebih baik dapat dicapai. Menurut pendekatan positivis modal sosial yaitu sebuah jejaring sosial yang berisi hubungan timbal balik untuk membangun kepercayaan yang tergabung dalam suatu kelompok.

Misalnya, kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Kuningan dalam penanggulangan bencana. Dengan adanya kepercayaan dan koordinasi yang baik antar daerah, sumber daya dan bantuan dapat disalurkan secara efektif dan efisien saat terjadi musibah, menunjukkan pentingnya kerjasama lintas wilayah demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

4. Peran Modal Sosial pada Pemerataan Pembangunan

Modal sosial dapat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh dukungan dan peluang yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan karena mereka memiliki akses ke jaringan dan sumber daya yang dimiliki oleh modal sosial.

Contohnya, keberadaan koperasi di berbagai desa di Cirebon. Koperasi yang didasarkan pada prinsip kebersamaan dan kekeluargaan menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling membantu dalam hal ekonomi, seperti simpan pinjam atau pemasaran produk. Hal ini memberikan akses modal dan peluang ekonomi bagi anggota yang mungkin sulit mendapatkannya dari lembaga formal, sehingga berkontribusi pada pemerataan pembangunan di tingkat desa.

5. Daya Tahan Masyarakat dalam Menghadapi Krisis

Modal sosial dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap krisis dan bencana. Masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat biasanya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk bekerja sama, saling membantu, dan mengatasi tantangan bersama dalam keadaan sulit. Contohnya, ketika terjadi pandemi COVID-19, masyarakat Cirebon menunjukkan daya tahan yang cukup baik. Jaringan sosial yang kuat di tingkat keluarga dan komunitas membantu dalam saling memberikan dukungan moril dan materi. Selain itu, muncul inisiatif lokal seperti pembuatan masker kain secara mandiri atau saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi warga yang terdampak secara ekonomi. Fleksibilitas dan adaptasi dalam mencari mata pencaharian alternatif juga menjadi bukti daya tahan masyarakat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat betapa pentingnya hubungan sosial yang kuat sebagai pondasi. Hubungan baik antar warga,



tradisi gotong royong, dan kerjasama yang terjalin, semuanya ini adalah wujud dari modal sosial. Modal sosial ini bukan cuma sekedar obrolan atau kumpul-kumpul biasa, tetapi mempunyai dampak nyata dalam meningkatkan kepercayaan dan kerjasama, ketika masyarakat saling percaya, mereka jadi lebih mudah untuk bekerja sama dalam berbagai hal.

Selain itu, kerjasama dan kepercayaan ini kemudian membuahkan hasil nyata dalam peningkatan pembangunan masyarakat. Contohnya, program Rumah Terasi menunjukkan bagaimana inisiatif yang memanfaatkan modal sosial (keterlibatan dan kepercayaan antar ibu-ibu) bisa meningkatkan taraf hidup dan pembangunan ekonomi di tingkat masyarakat. Lebih jauh lagi, modal sosial punya peran penting dalam pemerataan pembangunan. Keberadaan koperasi desa adalah contoh bagaimana modal sosial bisa memberikan akses ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, tidak hanya segelintir orang saja.

Dampak Modal Sosial terhadap Pembangunan Inklusif

Modal sosial memiliki peran penting dalam pembangunan inklusif karena memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pembangunan inklusif menekankan pada keterlibatan semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua individu, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan dan jaringan sosial, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam program pembangunan. Ketika masyarakat memiliki rasa saling percaya, mereka lebih cenderung bekerja sama dalam proyek-proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur desa, program kesehatan, dan inisiatif pendidikan. Misalnya, di beberapa desa yang memiliki kelompok gotong royong yang aktif, pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan irigasi dapat dilakukan secara mandiri dengan partisipasi warga.

2. Memperkuat Kesejahteraan Ekonomi melalui Jaringan Sosial

Jaringan sosial yang kuat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang sering terpinggirkan. Dengan adanya kerja sama dalam komunitas, akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi lebih luas, termasuk akses ke pasar, modal usaha, dan pelatihan keterampilan. Contohnya, dalam koperasi petani, anggota kelompok dapat berbagi informasi mengenai harga pasar, metode pertanian yang lebih efisien, dan akses ke lembaga keuangan untuk mendapatkan modal usaha. Hal ini membantu petani kecil meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Memperkuat Kohesi Sosial

Pembangunan inklusif menekankan pemerataan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat, dan modal sosial berperan dalam menciptakan solidaritas antaranggota masyarakat. Dalam komunitas yang memiliki modal sosial tinggi, interaksi antarindividu lebih erat, sehingga mencegah terjadinya marginalisasi sosial. Misalnya, di beberapa komunitas adat, sistem adat yang berbasis kebersamaan memastikan bahwa setiap anggota memiliki akses



terhadap sumber daya seperti tanah dan hasil pertanian. Ini mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

4. Memperkuat Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Institusi Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat penting dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Jika masyarakat merasa bahwa pemerintah transparan dan adil dalam mengelola sumber daya, mereka akan lebih aktif mendukung dan berpartisipasi dalam kebijakan publik. Sebaliknya, jika kepercayaan rendah, program-program pembangunan sering mengalami hambatan karena kurangnya partisipasi masyarakat. Contohnya, dalam program bantuan sosial, ketika masyarakat percaya bahwa bantuan tersebut didistribusikan secara adil, mereka lebih bersedia bekerja sama dengan pemerintah dalam program-program lainnya.

5. Meningkatkan Daya Tahan Sosial dalam Menghadapi Krisis

Modal sosial juga berperan dalam memperkuat ketahanan sosial, terutama dalam menghadapi krisis seperti bencana alam, pandemi, atau konflik sosial. Komunitas yang memiliki jaringan sosial kuat lebih mampu mengatasi kesulitan karena mereka dapat saling membantu dan berbagi sumber daya. Misalnya, saat pandemi COVID-19, banyak komunitas yang mengorganisir dapur umum, sistem barter, dan penggalangan dana untuk membantu warga yang terdampak, sehingga membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.

Maka, dapat disimpulkan bahwa modal sosial sangat krusial untuk pembangunan inklusif karena meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat ekonomi melalui jaringan, mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat kepercayaan pada pemerintah, dan meningkatkan daya tahan saat krisis. Kepercayaan dan jaringan sosial mendorong kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur dan program sosial. Jaringan sosial membuka peluang ekonomi bagi kelompok terpinggirkan. Modal sosial menciptakan solidaritas dan mengurangi marginalisasi. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah mendorong partisipasi dalam kebijakan publik. Saat krisis, jaringan sosial membantu masyarakat saling membantu dan pulih. Jadi, modal sosial adalah fondasi penting untuk pembangunan yang adil dan merata

Strategi Penguatan Modal Sosial untuk Keberlanjutan Pembangunan

Strategi modal sosial menjadi kunci utama untuk membangun pondasi yang kuat bagi keberlanjutan dan ketahanan pembangunan ekonomi lokal. Ini berdasarkan gagasan yang dikemukakan oleh Kimbal (2020) bahwa modal sosial terkait dengan kumpulan nilai atau norma informal yang dimiliki oleh anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerja sama. Modal sosial mengacu pada kualitas dan kuantitas hubungan sosial, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang terjalin dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi kinerja dan hasil pembangunan di berbagai bidang. Untuk memperkuat dan membangun modal sosial dalam pengembangan masyarakat, Adapun beberapa langkah yang bisa diambil, sebagai berikut:

1. Membangun jaringan sosial yang inklusif dan partisipatif untuk memberi masyarakat kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan, baik melalui representasi maupun partisipasi langsung. Misalnya, lakukan pertemendengarkan apa yang diinginkan masyarakat dan membantu kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.



2. Meningkatkan kapasitas masyarakat. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pembangunan dan membuat keputusan yang berdampak positif bagi komunitas. Misalnya, memberikan pelatihan keterampilan sosial atau teknis, memfasilitasi akses ke informasi tentang hak-hak dan sumber daya yang tersedia, dan memperkuat jaringan pendidikan formal dan nonformal.
3. Mendorong pengembangan institusi lokal yang inklusif dan partisipatif. Institusi ini harus dibangun dengan mempertimbangkan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi agar masyarakat dapat memiliki suara dalam proses pembangunan. Misalnya, buat forum yang terdiri dari warga lokal, LSM, dan pihak berwenang untuk mengawasi dan memantau program dan kebijakan serta mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik. Layanan publik harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan terbuka secara umum. Ini termasuk memperbaiki infrastruktur jalan dan air, meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, dan meningkatkan layanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Memfasilitasi diskusi antar kelompok dan mendukung kesetaraan dan keadilan sosial: Dalam masyarakat yang heterogen, diskusi dan komunikasi yang terbuka dapat memperkuat hubungan sosial dan mengurangi ketegangan dan konflik. Hal ini dapat dicapai dengan mengadakan diskusi dan komunikasi terbuka antar kelompok yang berbeda, memperkuat hak-hak komunitas minoritas, dan mengembangkan program yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tantangan dan Hambatan dalam Pemanfaatan Modal Sosial

1. Ketidaksetaraan Akses dan Distribusi Modal Sosial

Dalam konteks kesetaraan gender, penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial tidak selalu dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata oleh semua anggota kelompok. Di KWT Karya Maju, terdapat ketimpangan dalam akses dan penggunaan modal sosial berdasarkan gender. Laki-laki dalam kelompok ini umumnya lebih aktif dalam produksi pisang, yang memberi mereka kesempatan untuk membangun jaringan yang lebih luas dan memiliki pengaruh lebih besar, baik di dalam maupun di luar komunitas. Jaringan ini erat kaitannya dengan pemasaran dan distribusi produk, yang memungkinkan mereka memperoleh keuntungan lebih besar dari modal sosial, seperti akses terhadap informasi pasar, peluang kerja sama, dan sumber daya finansial.

Sebaliknya, perempuan yang lebih terlibat dalam produksi kopi cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih terbatas dan bersifat lokal, yang terdiri dari sesama perempuan dalam kelompok tani atau komunitas sekitar. Meskipun jaringan ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan proses produksi, dampaknya kurang signifikan dalam memberikan akses terhadap sumber daya yang lebih besar atau peluang yang dapat meningkatkan keberlanjutan usaha. Selain itu, norma sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan, baik dalam rumah tangga maupun komunitas, semakin memperparah ketimpangan ini. Akibatnya, perempuan kurang berpartisipasi dalam aspek-aspek strategis yang memengaruhi keberlangsungan usaha mereka.



Ketimpangan ini juga berdampak langsung pada berbagai aspek operasional usaha. Laki-laki yang memiliki akses lebih luas ke jaringan pemasaran cenderung mampu menjual produk dengan harga lebih kompetitif, sedangkan perempuan yang lebih fokus pada produksi sering menghadapi kendala dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk karena keterbatasan informasi dan teknologi. Akibatnya, meskipun modal sosial secara keseluruhan memberikan manfaat bagi komunitas, ketimpangan gender dalam akses dan pemanfaatannya menimbulkan kesenjangan yang cukup besar.

2. Pengaruh Perubahan Sosial dan Ekonomi

Urbanisasi sering dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah asal dan tujuan migrasi, tetapi dampak sosial budaya dari urbanisasi masih jarang menjadi fokus utama pembahasan. Padahal, urbanisasi tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga membawa perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Zelinsky (1971), mobilitas penduduk tidak sekadar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga memainkan peran dalam transformasi sosial budaya, menggeser masyarakat dari gaya hidup tradisional menuju pola hidup modern yang berasal dari luar daerah.

Perubahan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebiasaan, norma, adat istiadat, hingga hubungan kekeluargaan di lingkungan pedesaan dan perkotaan. Di daerah perkotaan, modernisasi sering menjadi pemicu perubahan sosial. Modernisasi ditandai dengan peralihan dari kebiasaan tradisional ke perilaku yang lebih modern, yang menyebabkan masyarakat lebih fokus pada peningkatan kondisi ekonomi. Akibatnya, kegiatan sosial budaya seperti gotong royong, silaturahmi dengan tetangga, atau partisipasi dalam acara adat semakin terpinggirkan.

Meskipun banyak generasi muda telah mengadopsi gaya hidup modern, nilai-nilai budaya tradisional tetap bertahan, meskipun penerapannya semakin berkurang. Dengan kata lain, perubahan sosial dalam masyarakat bersifat dinamis maupun statis. Menurut Soeprapto (2002), baik masyarakat yang dinamis maupun statis tetap memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berubah, karena tidak ada komunitas yang benar-benar stagnan dalam aspek sosial. Tekanan urbanisasi di kota-kota besar menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat perubahan ini.

Urbanisasi sendiri merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang berdampak pada distribusi populasi di suatu wilayah. Akibatnya, desa menjadi lebih sepi, sementara kota semakin padat. Urbanisasi juga mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi, menjadikan kota sebagai pusat lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan bisnis lokal. Namun, urbanisasi juga dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kriminalitas di perkotaan, karena kesulitan dalam mendeteksi dan menangkap pelaku kejahatan. Fenomena ini umum terjadi di berbagai negara, di mana pertumbuhan populasi perkotaan sejalan dengan pesatnya perkembangan industri.

Selain itu, adapun contoh lainnya yaitu Grameen Bank Bangladesh, yang didirikan pada tahun 1976, merupakan salah satu contoh sukses Lembaga Keuangan Mikro yang berperan dalam mendorong perekonomian rakyat. Bank ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan kredit tanpa agunan kepada masyarakat miskin, terutama



perempuan, yang sering kali tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Grameen Bank menerapkan sistem pembiayaan berbasis kelompok, di mana setiap peminjam saling mendukung dan bertanggung jawab secara kolektif terhadap pelunasan pinjaman. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Model Grameen telah diadopsi di berbagai negara sebagai strategi inovatif dalam mendukung pembangunan ekonomi di komunitas miskin. Penyediaan layanan pembiayaan mikro yang luas bagi sektor ekonomi rakyat telah dianggap sebagai langkah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Di Indonesia, pada tahun 1992, didirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menggabungkan konsep Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Lembaga ini berfokus pada pemberian layanan keuangan kepada sektor usaha mikro dengan prinsip syariah. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, sekitar 25,22 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini semakin diperparah oleh terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan formal yang sulit dijangkau akibat faktor geografis, persyaratan administrasi yang kompleks, serta rendahnya literasi keuangan.

Dalam situasi ini, LKMS hadir sebagai solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan akses keuangan bagi masyarakat miskin. Lembaga ini menawarkan layanan berbasis prinsip syariah yang lebih inklusif dan berorientasi sosial, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga). LKMS beroperasi berdasarkan nilai-nilai keuangan Islam dengan menyediakan layanan keuangan bagi kelompok berpenghasilan rendah, termasuk pembiayaan mikro, tabungan, dan pendanaan usaha kecil, semuanya tanpa riba dan mengedepankan prinsip keadilan serta transparansi.

Dengan menyediakan akses keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, LKMS berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di tingkat lokal juga mendapatkan manfaat besar dari keberadaan LKMS dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka (Jatnika et al., 2024).

3. Politik dan Kekuasaan

Penelitian tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi masih tergolong sedikit, dan hasil penelitian yang ada sering kali menunjukkan temuan yang bervariasi. Ketika individu berinteraksi satu sama lain, terjadi pertukaran kekuasaan sebagai bagian dari hubungan sosial mereka. Kekuasaan sendiri merupakan aspek fundamental dalam setiap interaksi sosial.

Menurut Heryawan Ahmad (2009), kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku dan selalu hadir dalam proses politik. Dalam ilmu politik, terdapat beberapa konsep yang terkait dengan kekuasaan, seperti pengaruh (influence), persuasi (persuasion), paksaan (coercion), dan kekuatan (force). Influence adalah kemampuan memengaruhi orang lain agar mereka mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Persuasion mengacu pada kemampuan untuk meyakinkan orang lain melalui argumen agar mereka melakukan suatu tindakan tertentu. Force berkaitan dengan penggunaan tekanan fisik, seperti pembatasan kebebasan atau hukuman, untuk memaksa pihak lain bertindak sesuai keinginan pemegang



kekuasaan. Sementara itu, coercion melibatkan penggunaan ancaman atau tekanan agar seseorang bertindak sesuai kehendak pihak yang lebih kuat.

Berdasarkan konsep tersebut, kekuasaan politik dapat didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan sumber daya untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik, baik untuk kepentingan individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Misalnya, sebuah organisasi atau partai politik yang berhasil mendorong kebijakan tertentu di pemerintahan memiliki kekuasaan politik. Konsep yang berkaitan erat dengan kekuasaan politik adalah kewenangan (*authority*), yaitu kemampuan untuk mengatur tindakan orang lain berdasarkan hukum atau mandat resmi.

Contohnya, seorang polisi yang menghentikan kendaraan di jalan bukan karena kekuasaan pribadinya, tetapi karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jika kewenangan ini disalahgunakan, individu yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum. Keinginan untuk memiliki kekuasaan dianggap sebagai bagian alami dari sifat manusia. Sartre dan Nietzsche mengemukakan bahwa manusia memiliki hasrat untuk dihargai dan berpengaruh dalam lingkungan sosialnya. Namun, seperti yang dikatakan oleh Lord Acton (dalam Greenberg dan Baron, 2000), "kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup." Hal ini telah terbukti dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun organisasi kemasyarakatan.

Di sisi lain, tujuan utama politik adalah mengatur dan mengelola masyarakat secara adil. Namun, dalam praktiknya, politik sering kali disalahgunakan oleh individu yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, stigma negatif terhadap politik lebih disebabkan oleh tindakan individu yang terlibat dalam politik, bukan oleh sistem politik itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan aset penting dalam mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang kuat berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, pemerataan kesejahteraan, serta ketahanan sosial dalam menghadapi krisis. Namun, efektivitas modal sosial dalam pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses, perubahan sosial akibat urbanisasi, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam politik.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memperkuat dan memanfaatkan modal sosial secara adil dan berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan, kebijakan inklusif, dan peningkatan transparansi dalam tata kelola pembangunan. Dengan memperkuat modal sosial, masyarakat dapat lebih mandiri, berdaya, dan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses kemajuan sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, A. (2024). Mencari Tambahan Ilmu. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 2(1), 137-144.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.
- Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal*



Pemikiran Sosiologi, 6(1), 1-17.

Hamsah, H., Tamrin, S., & Achmad, M. (2021). Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Dalam Muwujudkan Program Makassar Tidak Rantasa. *Jurnal Neo Societal*, 6(1), 78-84.

Handono, S. Y. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Malang: Tim UB Press.

Jatnika, D. C., Humaedi, S., Puti, F., & Padjadjaran, U. (2024). *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial PROGRAM PEMERINTAH DAN DINAMIKA PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK OPTIMALISASI KEBERFUNGSIAN SOSIAL Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*. 7(2), 237–249. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60625>

Kimbal, R. W. (2020). Peran modal sosial dikalangan pekerja perempuan dalam penguatan manajemen usaha industri kecil.

Maulidah, S., & Setiajid, S. (2021). Modal Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Diskriptif Kualitatif di Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang). *Unnes Political Science Journal*, 5(2), 48–52. <https://doi.org/10.15294/upsj.v5i2.48839>

Mursyidin, M., Hafni, N., Mardhiah, A., Rayuwati, R., Darmansyah, D., Rivandi, A., ... & Prayogi, A. (2024). Penerapan Modal Sosial, Dinamika Gender, dan Keberlanjutan Usaha Pisang Cavendish dan Kopi di KWT Bener Meriah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 6(2), 139-149.

Owa, M. F. O., & Leda, H. A. (2023). Optimalisasi Modal Sosial sebagai Strategi Kemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa Wolowea Barat Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 3916–3920.

Paramita, P. D. (2011). Keterkaitan antara politik dan kekuasaan dalam organisasi. *Dinamika Sains*, 9(21).

Rahman, A. (2022). *Tugas Manusia Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam*. 1(3), 242–249.

Saifuddin, S. E. (2020). Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Modal Sosial. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 6(2), 68-77.

Subagyo, R. 2021. MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN BOJONEGORO.: *Journal of unesa*, 10(1).